

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang demokrasi. Demokrasi pada hakekatnya merupakan system pemerintahan yang berasal dari oleh dan untuk rakyat. Salah satu wujud dari penerapan demokrasi Indonesia saat ini adalah pemberian hak dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam hal penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, pendelegasian wewenang dari pusat kepada pemerintah daerah yang dimaksudkan agar daerah-daerah secara geografis jauh dari pemerintah pusat agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara cepat dan merata, dalam ini agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita republic Indonesia.

Salah satunya adalah wilayah pedesaan yang merupakan wilayah terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, peran pemerintahan dilakukan oleh oleh pemerintah desa yaitu kepala desa beserta aparat desa lain nya. Peran pemerintah desa menjadi penting sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak assl usul, dan atau hak tradisional yang akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Pembangunan pedesaan selayaknya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, oleh karena itu perlu keterkaitan dengan bidang sector dan aspek diluar pedesaan sehingga dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pemberdayaan masyarakat desa seharusnya lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat petani, dimana masyarakat petani merupakan mayoritas bagi penduduk desa. Pemberdayaan bagi masyarakat petani sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan diri mereka dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan agar dapat lebih maksimal menggali potensi diri mereka untuk menerapkan teknologi sehingga produksi hasil pertanian dapat meningkat dan tercapai secara efektif dan efisien.

Kunci masuk program pemberdayaan masyarakat dipedesaan adalah tokoh-tokoh petani, dan menjadikan petani sebagai mitra dalam program pemberdayaan masyarakat, sehingga akan menumbuhkan motivasi dan mempercepat pencapaian tujuan dari program pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksi. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek atau sector-sector kehidupan manusia .dimensi kemsyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil. Dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada

masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran peningkatan kemampuan diri masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan, memutuskan dan mengelolah sumber daya yang dimiliki *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, social dalam bermasyarakat. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proposional untuk mencapai keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, social ekologis yang dinamis. Maka dari pada itu penguatan masyarakat di daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan, karena masyarakat telah banyak menunjukkan bahwa mereka memiliki kehendak dan keinginan untuk memperbaiki segi-segi kehidupan baik di sector politik, ekonomi social dan lainnya sebagaimana dibuktikan dengan sikap kritis dalam merespon setiap gejala dan tindakan aparat pemerintah.

Isu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi dan transparansi semakin banyak dibicarakan dalam forum-forum diskusi yang dilakukan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, nasional dan internasional, dan melalui artikel-artikel dalam media massa. Kesimpulannya mempersoalkan sikap apatis masyarakat terhadap proyek pembangunan, partisipasi masyarakat yang rendah dalam pembangunan, penolakan masyarakat terhadap beberapa proyek pembangunan, ketidakberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan serta pemecahan masalahnya, tingkat adopsi masyarakat yang rendah terhadap inovasi, dan masyarakat cenderung menggantungkan hidup terhadap bantuan pemerintah, serta kritik-kritik lainnya yang umumnya meragukan bahwa masyarakat memiliki potensi untuk dilibatkan sebagai pelaksana pembangunan. Meskipun kritik-kritik diatas ada benarnya, tetapi dengan hanya menyalahkan

masyarakat tanpa mencari faktor-faktor penyebabnya maka permasalahannya tidak dapat dipecahkan (Suriadi, 2005: 56).

Pendekatan top-down tidak mengembangkan masyarakat untuk mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan ide-ide baru yang lebih sesuai dengan kondisi setempat dan mengakibatkan ketergantungan. Namun masyarakat harus diberi kepercayaan dalam pembangunan, dimana hasil yang lebih berkelanjutan akan dicapai jika masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas mendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumber daya yang mereka miliki. Mereka sendiri yang membuat keputusan-keputusan dan rencana-rencana, mengimplementasikan serta mengevaluasi keefektifan kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian masalah tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul HUBUNGAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN PERBAIKAN LINGKUNGAN (Studi di Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso)

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi focus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Sejauh manakah peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat terhadap perbaikan lingkungan di Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Peneliti

Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk perbaikan lingkungan di Desa Sumbersari Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan dan sumber informasi bagi peneliti terutama yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan khususnya dalam melihat peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada perbaikan lingkungan.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan referensi serta pertimbangan bagi penelitalainnya dalam mengetahui apa saja pemerintah desa , Serta di harapkan dapat bermanfaat, bagi pihak yang berkepentingan